

Judul Penelitian : Tanggapan Masyarakat terhadap Formalisasi Kepemimpinan Desa (Pilkades)
Ketua Peneliti : Drs. Muhammad Asfar
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1990/1991
S.K Rektor Nomor: 7744/PTO3.H/W/1990
Tanggal 24 September 1990

Penelitian ini, mengajukan dua permasalahan pokok, yaitu:

1. Sejauh manakah pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang no. 5 tahun 1979.
2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap pelaksanaan program formalisasi kepemimpinan desa (pilkades)

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi secara luas dan mendalam tentang permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Menggambarkan pengetahuan masyarakat desa tentang Undang-Undang no. 5 tahun 1979.
2. Mengidentifikasi dan menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan formalisasi kepemimpinan desa.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah --terutama Departemen Dalam Negeri-- untuk mengembangkan pembinaan masyarakat desa, bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan tentang persoalan pedesaan, dan memecahkan persoalan-persoalan politis di pedesaan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Dari 246 KK yang ada, 50 diantaranya diambil sebagai sampel, dengan menggunakan metode sistematis random sampling, data primer dilakukan dengan wawancara dengan kuesioner yang sudah terstruktur, disamping juga dilakukan wawancara secara terbuka dan bebas untuk pelengkap data. Sementara itu, data yang masuk dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, sebagian besar responden tidak mengetahui dan memahami isi UU no 5 tahun 1979, baik yang berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang

keberadaan pemerintahan desa, perangkat-perangkat yang membantunya (Sekretariat Desa), maupun tentang LMD.

Pada umumnya, responden menyambut positif pelaksanaan pilkades, meskipun ada beberapa responden yang menunjukkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, baik yang dilakukan oleh panitia pemilihan pada peringkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Kekurangan ini, terutama, berkaitan dengan besarnya "uang siluman" yang harus disediakan oleh calon kepala desa.

